

# Zulfadli Diperiksa Tujuh Jam

Usman Jafar Menyusul

PONTIANAK. Masih ingat dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Kalbar Tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 miliar? Kasus yang hampir ditangani KPK dan tersendat di Polda Kalbar itu, mulai dibuka lagi. Penyidik Polda Kalbar memeriksa Zulfadhli, anggota DPR-RI sebagai saksi, Selasa (17/1).

"Pemeriksaan Zulfadhli sebagai saksi tanpa mengantongi izin Presiden. Tetapi mengacu kepada Pasal 289 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," kata AKBP Mukson Munandar, Kabid Humas Polda Kalbar, Kamis (19/1).

Dalam aturan itu, kata Mukson, jika tidak ada persetujuan tertulis dalam waktu 30 hari untuk anggota MPR, DPR, DPD,



Zulfadhli

dan DPRD, maka proses penyelidikan dan penyidikan sudah dapat dilakukan tanpa menunggu turunnya persetujuan Presiden.

Zulfadhli diperiksa di Mapolda Kalbar selama tujuh jam sejak pukul 08.00 hingga 15.00. Ia menjadi saksi untuk tersangka Iswanto, mantan Wakil Bendahara KONI. Saksi lainnya yang akan diperiksa adalah Usman Ja'far (UJ) mantan Gubernur Kalbar.

Keterangan Zulfadhli dan UJ merupakan kelengkapan bagi Polda Kalbar untuk mendapatkan hasil audit BPK. Hal tersebut telah menjadi petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada polisi.

Mukson menjelaskan, Polda Kalbar terus mengupayakan pengusutan kasus Bansos KONI. Surat pemanggilan saksi dikirim Polda melalui Ketua DPR-RI agar saksi memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan.

Untuk pemanggilan UJ, kata Mukson, segera menyusul. Pihaknya tetap meminta keterangan dari UJ meskipun belum dapat merinci jelas kapan pemeriksaannya. "Dalam waktu dekat akan diperiksa," katanya.

Penanganan kasus ini sudah cukup lama

## Zulfadhli Diperiksa .....dari halaman 1

berlangsung. Awalnya ditangani Poltabes Pontianak (sekarang Polresta) pada bulan September tahun 2009.

Di Polresta Pontianak, kasus ini cukup menyedot perhatian. Satuan Reskrim Polresta Pontianak saat masih dipimpin AKP (sekarang Kompol Sunario) memeriksa sejumlah pejabat, termasuk Sekda Kalbar kala itu, Syakirman.

Pada masa Kapolda, Erwin

TP Lumban Tobing, kasus ini diambil alih Polda Kalbar, tepatnya tanggal 30 Desember 2009. Begitu diambil alih, hampir setahun kasus ini belum ada perkembangan yang berarti karena Polda mengaku tidak memiliki hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar.

Tanggal 14 Januari 2011, BPK perwakilan Kalbar melalui

BPK pusat menyerahkan hasil audit dugaan korupsi Bansos ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas dasar pertimbangan sudah ditangani Polda, KPK melalui Humasnya, Johan Budi SP yang dihubungi Equator beberapa waktu lalu mengakui KPK menyerahkan penanganan kasus tersebut ke Polda Kalbar dengan tetap disurveksi KPK. (sul)